

PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDANG DI INDONESIA*

A.R. SOEHOED

Perkembangan industri kecil dan sedang selalu menjadi salah satu sasaran kebijakan utama sejak Repelita I. Dalam Repelita III ini, di mana untuk pertama kali diberikan tekanan yang lebih besar terhadap peranan sektor manufaktur terutama industri yang berdasarkan pada sumber daya, promosi industri kecil dan sedang dilekatkan secara khusus dalam Trilogi Pembangunan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
2. Pembagian yang merata;
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Di kalangan para perencana dan pelaksana terdapat kesepakatan bahwa sementara industri besar yang padat modal merupakan alat untuk pertumbuhan industri dan ekonomi yang tinggi, pembagian yang merata harus dicapai melalui promosi industri sedang dan kecil (termasuk industri rumah tangga).

Dalam dasawarsa 1970-an, karena rangsangan insentif pajak melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, kapasitas manufaktur sangat meningkat dan mampu mensuplai kira-kira lebih dari separuh permintaan dalam negeri untuk produk industri. Meskipun demikian, sebagian besar masih merupakan industri substitusi impor, terutama dipusatkan pada barang-barang konsumsi. Industri ini termasuk tekstil, makanan dan minuman, barang-barang listrik dan elektronik. Berdasarkan sifatnya industri tersebut merupakan industri menengah.

*Diterjemahkan dari makalah yang berjudul "The Development of Small- and Medium-Scale Industries in Indonesia," yang disampaikan dalam "Tenth Japan-Indonesia Colloquium," Kobe, Jepang, 20-22 September 1982. Waktu itu A.R. SOEHOED adalah Menteri Perindustrian. Diterjemahkan oleh Nancy K. SUHUT.

Perkembangan industri sedang dan kecil secara administratif berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Aneka Industri dan Direktorat Jenderal Industri Kecil. Pemisahan dan pengkhususan ini yang diperkenalkan dengan reorganisasi Departemen Perindustrian pada tahun 1979, mencerminkan kesepakatan bagi promosi industri sedang dan kecil dalam Repelita III. Dua Direktorat Jenderal lainnya yakni: Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar dan Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar menguasai sektor dasar. Direktorat Jenderal kelima yang menangani penelitian dan pengembangan industri mencerminkan pentingnya alih teknologi dan pengembangan.

Perkembangan industri barang konsumsi dalam dasawarsa terakhir ini secara umum sama dengan pertumbuhan manufaktur sedang, terutama yang dibangun melalui Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, meskipun banyak usaha patungan berusaha melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Industri ini meliputi makanan dan minuman, tekstil, pemrosesan kayu, barang-barang kimia, farmasi, industri ringan, percetakan, plastik, alat-alat rumah tangga listrik, alat-alat konsumsi elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor. Mesin-mesin berat, elektronik profesional, sepeda motor, suku cadang kendaraan bermotor yang kritis, logam dasar dan kimia dasar umumnya berada di luar jajaran industri sedang. Hal ini merupakan pengecualian yang wajar; pabrik semen mini yang sedang dibangun di Kupang mungkin akan dikelompokkan secara teknis dalam industri sedang berdasarkan ukuran Indonesia, tetapi investasi modal US\$ 23 juta dalam mesin-mesin dan tenaga kerja tidak dapat ditempatkan dalam jajaran tersebut; dan dalam kenyataan berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar. Sekali lagi, antara enjineri ringan dan enjineri berat terdapat keragu-raguan, dan pengelompokan dalam bidang ini tidak dapat dibuat karena peraturan-peraturan yang sulit dan saling berkaitan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa mesin-mesin konsumsi dan rumah tangga dapat dikelompokkan dalam industri sedang dan ditempatkan di bawah wewenang Direktorat Jenderal Aneka Industri. Suatu kasus yang menarik adalah industri rokok tradisional (pembuatan rokok keretek), yang meliputi seluruh jajaran dari industri rumah tangga sampai sedang dan besar, semua pada prakteknya menggunakan metoda produksi yang sama. Tiga perusahaan terbesar di sektor ini bersama-sama mempekerjakan lebih dari 60.000 orang, dan kontribusinya sekitar 60% dari seluruh pajak yang berasal dari rokok dan minuman beralkohol.

Kebijakan promosi pemerintah berbeda antara industri sedang dan kecil; pada tingkat ini pengusaha kecil -- terutama yang termasuk golongan ekonomi lemah -- diperlakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat paternalistis. Industri rumah tangga dan kerajinan tangan tentu juga termasuk dalam kelompok ini. Suatu industri dikelompokkan kecil apabila investasinya tidak melampaui US\$ 100.000 termasuk tanah dan tempat usaha.

Daerah atau lingkungan khusus dikembangkan melalui Program BIPIK untuk industri kecil. *Mini Industrial Estates* merupakan kelompok-kelompok yang menyediakan tempat untuk kegiatan produksi, sarana jasa-jasa penyelesaian seperti untuk proses bahan mentah, sarana latihan dan sarana pemasaran.

Suatu aspek penting dalam pelaksanaan semua tindakan ini adalah konsep hubungan, misalnya hubungan dengan industri sedang atau besar, dan hubungan dengan sektor lain seperti industri pariwisata dan perdagangan ekspor. Sub-kontrak dengan perusahaan-perusahaan sedang dan besar dipromosikan melalui apa yang disebut "rencana hubungan bapak angkat."

Keputusan Presiden juga menetapkan bahwa kontrak pemerintah yang kecil, misalnya, di bawah nilai US\$ 60.000 harus diberikan pada perusahaan pribumi yang kecil, dengan prioritas khusus untuk pengusaha ekonomi lemah. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan pemerintah juga menyerahkan penguasaan pertanian di luar sub-kontrak mereka pada perusahaan kecil yang dapat dipakai.

Sekarang rencana peraturan tersebut telah dilaksanakan, beberapa industri khusus disediakan hanya untuk kegiatan industri kecil. Pada saat ini terdapat sekitar 150 produk yang disediakan untuk usaha industri kecil melalui rencana ini.

KERJA SAMA JEPANG-INDONESIA DALAM BIDANG MANUFAKTUR

Jepang telah memainkan peranan yang sangat penting, apabila bukan dominan, dalam perkembangan industri manufaktur selama dasawarsa terakhir. Sampai tahun 1980 sejumlah 138 perusahaan Jepang telah mendirikan usaha patungan di Indonesia melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Sekitar 25% dari jumlah investor asing (520 perusahaan) mengambil bagian dalam perindustrian Indonesia. Investasi langsung Jepang berjumlah US\$ 1,26 milyar, atau 31,5% dari seluruh investasi asing atau 16,8% dari seluruh investasi (investasi langsung dalam negeri dan asing). Ini tidak termasuk pinjaman yang terdapat dalam investasi Jepang, yang kira-kira lebih dari dua kali nilai investasi langsung. Usaha patungan Jepang mempekerjakan 45.000 orang atau 16% dari seluruh angkatan kerja yang terikat dalam industri usaha patungan.

Di samping usaha melalui modal sektor swasta dan bantuan keuangan, jumlah bantuan keuangan yang disponsori oleh pemerintah yang sungguh-

lalui Dialog ASEAN-Jepang; dan riset bersama antara lembaga-lembaga Jepang dan Departemen Perindustrian.¹ Bantuan peralatan pusat komputer untuk statistik dan perencanaan industri melalui kredit Yen untuk Departemen Perindustrian juga sedang dipersiapkan.

Perdagangan antara Indonesia dan Jepang, yang berkembang cepat dalam dasawarsa 1970-an, merupakan suatu faktor penting dalam mendorong perkembangan sektor manufaktur Indonesia. Walaupun demikian menjadi suatu akibat yang wajar dari investasi Jepang, dan kenyataannya kebanyakan perdagangan diorganisasi dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kepentingan sama yang membiayai usaha patungan, sudah merupakan suatu harapan yang bercampur. Sementara usaha patungan ini telah mengembangkan kapasitas produksi Indonesia secara kuantitatif sama dengan nilai kualitatifnya, kapasitas ini sebagian besar berada dalam tahap akhir proses produk akhir atau dalam pengumpulan bahan mentah untuk ekspor. Jadi mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kebutuhan industri Jepang untuk menjamin pasar atau sumber suplai bahan mentah. Dalam kasus lain, peningkatan nilai tambah terhadap perusahaan Indonesia biasanya minimal.

Investasi Jepang di luar negeri sering kali dikaitkan dengan industri-industri lama yang dihapuskan secara bertahap di Jepang dan tidak dapat bersaing lagi baik di pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Pada umumnya mereka termasuk industri padat karya. Kasus lama adalah industri tekstil yang pada dasawarsa 1950-an sampai awal dasawarsa 1960-an menjadi komoditi utama perdagangan ekspor Jepang. Setelah Jepang tidak mampu bersaing lagi, industri ini (paling tidak akhir industri hilirnya) dialihkan ke luar melalui investasi di Asia Tenggara, terutama Indonesia.

Sementara penyusunan kembali ekonomi nasional merupakan suatu kriteria yang benar untuk mengalihkan investasi ke negara sedang berkembang, tampaknya pandangan terakhir pergerakan investasi asing hanya tergantung pada penghapusan industri yang secara bertahap tidak terpakai lagi untuk mencapai kegunaan yang sangat marginal. Dan sementara negara sedang berkembang (Indonesia) tidak menginginkan keputusan investasi dari perusahaan-perusahaan bisnis diarahkan oleh motivasi hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi kepentingan nyata kedua pihak yaitu stabilitas sosial-ekonomi dan politik di negara penerima dijamin oleh sektor manufaktur yang berkembang dengan baik.

¹Antara lain riset mengenai pengembangan dan penerapan *natural sorbents* untuk membersihkan tumpahan minyak, dengan Pusat Penelitian Industri Tekstil, Bandung; riset mengenai perbaikan dan pengembangan produk tembikar, dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Keramik, Bandung; penelitian mengenai pemanfaatan bahan-bahan pabrik yang tidak dimanfaatkan, dengan Badan Penelitian Selulosa, Bandung; riset mengenai kecepatan warna dalam kebebasan yang rendah, dengan CITI, Bandung.

Jepang. Sebagai contoh, dalam bulan Desember 1981, tidak kurang dari 99 jenis barang yang berhubungan dengan prosedur pengujian impor dan lain-lain dibebaskan, sehingga memudahkan akses ke pasar Jepang. Langkah-langkah ini ditujukan bagi negara industri agar dimanfaatkan, dan permintaan akan perlakuan yang lebih baik harus dipertimbangkan secara jujur, atau sebaliknya langkah-langkah itu tidak usah diambil. Sama jujurnya bahwa manufaktur Indonesia diberikan kesempatan yang lebih menyenangkan dan lebih baik untuk memasuki pasar Jepang, selama kedua negara ini mempunyai kerja sama ekonomi yang erat.

Suatu analisa dari 138 perusahaan Jepang yang telah melakukan investasi di Indonesia akan menetapkan bahwa umumnya mereka merupakan cabang (subsidiary) atau asosiasi lain dari suatu kelompok perusahaan yang besar, biasanya dengan sebuah bank atau *trading house* (sogo shosha) di pusat. Akibatnya, sejumlah investasi Jepang di Indonesia dapat dikembalikan kepada delapan perusahaan raksasa yang menguasai industri Jepang. Dan itulah sebagian latar belakang mengapa usaha patungan yang dilakukan di Indonesia dalam tahun 1970-an terutama berbentuk sarana pemasaran atau suplai bahan baku.

Dapatkah perusahaan-perusahaan Jepang yang lebih kecil atau sedang yang tidak terikat dengan kelompok perusahaan besar, diusulkan untuk melakukan investasi di Indonesia? Seharusnya mereka merupakan jumlah yang besar dengan kemampuan produk yang sama besar. Dan investasi asing di Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan perusahaan dalam ukuran besar atau sedang. Untuk sementara harus dipelajari kemungkinan dan prospek investasi kecil di Indonesia oleh perusahaan Jepang yang bebas. Investasi semacam ini dapat melayani sektor manufaktur di Indonesia secara lebih luas dan mendalam.

Lampiran

INDUSTRI DASAR/KUNCI DAN PUSAT PERTUMBUHAN

Repelita III menetapkan bahwa pembangunan industri dasar dan industri kunci lainnya mengolah sumber daya pertanian dan pertambangan menjadi bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Pembuatan peralatan pengolahan dan mesin-mesin lain harus dikembangkan.

Di bidang industri dasar dan kunci, dewasa ini terdapat 52 badan usaha proyek kunci baik yang sudah selesai, sedang dibangun, siap dibangun ataupun yang sedang menunggu perizinan. Mereka ini meliputi 27 proyek di sektor kimia dasar, 18 proyek di sektor teknik industri dan logam dasar, dan 7 proyek di sektor aneka industri.

2. Sumatera Selatan yang meliputi daerah Palembang, Bangka, Belitung, Bukit Asam, Lampung dan Banten direncanakan untuk:

- (1) Pusat aromatik di Plaju (Sumatera Selatan);
- (2) Pabrik besi strip dan lembaran dengan proses panas di Cilegon (Banten);
- (3) Pabrik pellet, Cilegon;
- (4) Pabrik lembaran besi dengan proses dingin, Cilegon;
- (5) Pabrik timah lempengan, Cilegon;
- (6) Pabrik untuk produk-produk pengecoran (kosong) bagi mesin, Cilegon;
- (7) Perluasan pabrik barang-barang tempaan (kosong) untuk mesin, Cilegon;
- (8) Perluasan sistem distribusi pupuk;
- (9) Pabrik peralatan mesin, Cilegon;
- (10) Kemungkinan pabrik pipa tanpa sambungan (kelim) di Cilegon;
- (11) Pabrik pembuatan ban untuk di luar jalan raya dan tenaga berat serta industri barang dari karet;
- (12) Proyek polyester;
- (13) Pabrik mesin, Cilegon;
- (14) Pabrik peralatan berat, Cilegon;
- (15) Industri kecil.

3. Jawa (kecuali Banten) dan Bali direncanakan untuk:

- (1) Optimasi pabrik pupuk Kujang, di Cikampek, Jawa Barat, untuk memproduksi ammonium-nitrat;
- (2) Perluasan kompleks pupuk PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, untuk memproduksi TSP;
- (3) Perluasan proyek pupuk PT Petrokimia untuk membuat asam fosfat, ammonium-sulfat, gips dan aluminium fluorida;
- (4) Pembangunan pabrik *fibre polyester*;
- (5) Peningkatan sistem distribusi pupuk;
- (6) Perluasan pabrik kertas Lece di Lece, Jawa Timur;
- (7) Proyek kertas koran PN Lece (Lece IV);
- (8) Proyek soda abu;
- (9) Pabrik kertas kantong semen di Cilacap, Jawa Tengah;
- (10) Perluasan pabrik semen; PT Cibinong II di Cibinong, Jawa Barat;
- (11) Kemungkinan pendirian pabrik pipa tanpa sambungan (kelim);
- (12) Pabrik mesin diesel dan minyak;
- (13) Pembuatan kapal di Jakarta dan Surabaya;
- (14) Pabrik peralatan berat;
- (15) Pabrik gerbong kereta api di Madiun, Jawa Timur;
- (16) Pengembangan pabrik untuk membuat trem listrik (power-train), sistem pegas dan kemudi kendaraan bermotor di Jakarta atau Surabaya;
- (17) Pengembangan pengetahuan mengenai daerah industri untuk industri-industri elektronik di Jakarta atau Bandung;
- (18) Pabrik mesin sepeda motor di Jakarta atau Surabaya;
- (19) Pabrik peralatan mesin di Surabaya;
- (20) Perluasan pabrik pemintalan PT Industri Sandang I di Jawa Barat;
- (21) Perluasan pabrik pemintalan PT Industri Sandang II di Jawa Timur;
- (22) Perluasan pabrik pemintalan PT Primmissima di Yogyakarta;
- (23) Perluasan pabrik pemintalan di Jawa Tengah;
- (24) Industri kecil.